

PROBLEMATIKA PEMBERIAN LAYANAN ABORSI AMAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

INTISARI

Nuril F. Lamawatu¹, Sri Wiyanti Eddyono²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam implementasi pemberian layanan aborsi aman bagi korban perkosaan serta untuk mengkaji ketersediaan ruang bagi perempuan korban perkosaan penyintas aborsi tidak aman dalam mengakses layanan psikologi sebagai upaya pemulihan dan pemberdayaan perempuan secara psikologis.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Empiris. Menggunakan data primer melalui proses wawancara dengan narasumber dan responden, data sekunder, serta data tersier. Hasilnya kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam hal pemenuhan hak atas layanan aborsi aman bagi perempuan korban perkosaan, yaitu batasan usia kehamilan untuk melakukan aborsi yang relatif singkat yaitu 6 minggu usia kehamilan, perspekti terhadap korban, ketersediaan layanan aborsi aman oleh pemerintah, proses pembuktian yang cenderung memakan waktu padahal usia kehamilan korban semakin bertambah, minimnya informasi layanan aborsi aman pada masyarakat, serta hadirnya stigmatisasi terhadap korban dari keluarga, masyarakat, Aparat Penegak Hukum (APH), dan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Selanjutnya, pemerintah melalui UPT PPA masing-masing Kota/Kabupaten telah memberikan ruang dan akses bagi perempuan korban perkosaan dalam hal layanan psikologi. Namun terdapat disparitas akses antara perempuan korban perkosaan dan penyintas aborsi aman maupun tidak aman. Korban perkosaan akan diberikan layanan psikologi oleh UPT PPA sedangkan pelaku (penyintas aborsi) akan dirujuk pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Biro Psikologi. Selain itu, sumber daya psikolog yang ditempatkan pada UPT PPA tidak difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan pelatihan mengenai penanganan terhadap kasus-kasus berbasis gender.

Kata Kunci: Layanan Aborsi, Perempuan, Korban Perkosaan, Hukum Kesehatan.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

PROBLEMS OF PROVIDING SAFE ABORTION SERVICES FOR WOMEN RAPE VICTIMS REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTH LAW

ABSTRACT

Nuril F. Lamawatu³, Sri Wiyanti Eddyono⁴

The aims of the study is to find out and analyze the obstacles in the implementation of safe abortion services for rape victims and to examine the availability of space for women rape victims and survivors of unsafe abortions to access psychological services as an effort to recover and empower women psychologically. This study uses the Juridical-Empirical method. Primary data will be used through interviews with sources and respondents, secondary and tertiary data. The results are then analyzed qualitatively and described descriptively.

This study shows that several things are problematic in terms of fulfilling the right to safe abortion services for women victims of rape, namely the gestational age limit for a relatively short abortion, namely 6 weeks of gestation, the perspective of the victim, the availability of safe abortion services by the government, the proving process that tends to take time even though the victim's gestational age is increasing, The lack of information on safe abortion services in the community, as well as the presence of stigmatization of victims from families, the community, Law Enforcement Officers (APH), and medical or Health workers. Furthermore, the government, through the UPT PPA of each City/Regency, has provided space and access for women victims of rape in terms of psychological services. However, there is a disparity in access between women victims of rape and survivors of safe and unsafe abortions. Rape victims will be provided with psychological services by the UPT PPA, while the perpetrators (abortion survivors) will be referred to Health Service Facilities or Psychology Bureaus. In addition, the government does not facilitate psychologist resources placed in UPT PPA to receive training on handling gender-based cases.

Keywords: Abortion Services, Women, Rape Victims, Health Law.

³ Postgraduate student of Master of Health Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Lecturer of Faculty Of Law, Universitas Gadjah Mada